PENDAHULUAN

Pembentukan komite sekolah dalam satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Kota/Kabupaten adalah merupakan bagian dari pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah diterapkan sebelumnya adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/2002. Manajemen Berbasis Sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional (2001) pada dasarnya adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Dukungan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar menunjukan antusiasme yang cukup menggembirakan, tampak dari lembaga pendidikan swasta, baik umum maupun yang berafiliasi pada agama tertentu. Partisipasi masyarakat juga sering diwujudkan dengan keikutsertaan para orang tua dalam kegiatan lain di sekolah yang terwadahi dalam komite sekolah, hal ini sejalan dengan pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (Sujanto, 2007:6).

Dalam buku panduan umum dewan pendidikan dan sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Mengengah (2005:44) yang memuat tentang Lampiran I, Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanl Nomor 044/2002 tanggal 02 April 2002 disebutkan bahwa peran komite sekolah adalah sebagai : a) pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; b) pendukung *(Supporting agency)*, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; c) pengontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitaspenyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan; d) mediator antara pemerintah *(eksekutif)* dan Dewan perwakilan Rakyat *(legislative)* dengan masyarakat disatuan pendidikan dalam menjalankan peranya, komite sekolah berfungsi untuk: a) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; b) melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat; d) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai kebijakan dibidang pendidikan; e) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; f) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (Anonim, 2005:44).

Memang belum semua komite sekolah bisa menjalin hubungan kerja yang baik dengan pihak sekolah, diantarnya belum terbangunya hubungan kerja yang baik, bahkan yang masih sering terjadi adalah masih adanya ego di dalam salah satu pihak, biasanya pihak sekolah merasa lebih berhak mengambil kebijakan hingga mengesampingkan komite sekolah dalam mengambil setiap kebijakan sekolah. Sehingga komite sekolah belum bisa maksimal melaksanakan peranya.

SMPN 5 Klaten adalah salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Klaten yang tidak lepas dari permasalahan tersebut. Saat peneliti mengadakan pengamatan awal, peneliti menemukan fakta di SMPN 5 Klaten bahwa adanya hubungan kerja antara komite sekolah dengan pihak sekolah yang belum maksimal, komite selama ini masih bersikap pasif artinya bahwa komite belum mampu mengambil inisiatif untuk pelaksanaan sebuah koordinasi kerja, komite sekolah masih bersifat menunggu dari pihak sekolah untuk mengadakan koordinasi maupun rapat-rapat.

Inilah yang mendasari mengapa peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan harapan ke depan tercipta hubungan yang lebih baik antara komite sekolah dengan pihak sekolah, dengan menempatkan posisi masing-masing secara proporsional sesuai dengan amanat undang-undang.

Fokus Penelitian

a) Bagaimana karakteristik komunikasi formal yang dibangun oleh komite sekolah dengan sekolah dalam rangka melaksanakan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan?
b) Bagaimana karakteristik komunikasi informal yang dibangun antara komite sekolah dengan sekolah dalam rangka melaksanakan fungsi komite sekolah sebagai penampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat di SMPN 5 Klaten?
c) Bagaimana karakteristik nilai-nilai komunikasi komite sekolah dengan pihak sekolah dalam rangka melaksanakan peran komite sebagai pendukung *(supporting agency)* baik yang berwujud pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, tujuan utama penelitian ini adalah menggali informasi secara mendalam terhadap fenomena yang dijadikan sasaran penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik, dimana hasil penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata, memberikan gambaran atau mendeskribsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang akan diteliti.

Menurut Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2010:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan William mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pengumpulan data pada suatu latar alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Dalam hal ini studi ethnografi adalah tentang hubungan kerja komite sekolah dengan pihak sekolah di SMPN 5 Klaten

Desain penelitian adalah suatu rencana studi akan kajian merupakan hasil *(product)* pentahapan rencana suatu penelitian. Desain itu kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan penelitian, selanjutnya data yang telah

dikumpulkan dianalisis kemudian dituangkan ke dalam laporan penelitian. Pada saat peneliti mengumpulkan data, penetapan desain penelitian dalam penelitian kualitataif dikerjakan sepanjang masa penelitian bahkan sampai penelitian berakhir. Walaupan desain penelitian ditetapkan di awal penelitian, namun perlu diperhatikan bahwa masih bersifat sementara.

Menurut Malinowski dalam Spradley (2007:3) etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan dari etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, dalam hubunganya dengan kehidupan untuk mendapat pandanganya mengenai dirinya.

HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti berdasarkan data, dokumen, informasi dan dari hasil wawancara, peneliti dapat menemukan hal-hal yang berhubungan kerja komite dengan sekolah. Temuan tersebut dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. **Karakteristik komunikasi formal komite sekolah dalam rangka melaksanakan peran komite sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di SMPN 5 Klaten:**
   a. Tingkat kehadiran rapat baik.
   b. Tingkat partisipasi/*participation* anggota komite dalam memberikan usulan kepada sekolah baik.
   c. Tingkat komunikasi/c*omunication* komite dengan sekolah kurang intensif.
   d. Tingkat rasa berbagi/*share* antara komite dengan sekolah masih kurang.
   e. Tingkat rasa saling percaya/*trust* antara komite dan sekolah masih kurang.
   f. Tingkat rasa saling menerima/*acceptable* antara komite dengan sekolah cukup baik.
   g. Jumlah anggota komite ada 9 orang.
   h. Komite ini diketuai oleh seorang pengusaha dan berpendidikan serta matang dalam organisasi.

i. Diantara anggota komite ada beberapa yang memilki sifat kritis, aktif dan agressif.
j. Ada anggota komite yang bersifat pasif dan pendiam.
k. Anggota komite sebagian besar berasal dari kalangan pendidik.
l. Bahwa komunikasi formal diimplementasikan dalam bentuk rapat pleno antara komite dengan sekolah tidak rutin.
m. Bahwa komunikasi ini juga dibangun dalam bentuk rapat koordinasi dan tidak rutin.
n. Bahwa komunkasi ini juga diimplenetasikan dalam bentuk rapat yang bersifat konsultatif bersifat situasional.
o. Mengutamakan azas musyawarah dalam mengambil keputusan.
p. Rapat komite dengan sekolah tercatat dalam buku notulensi rapat
q. Dalam setiap rapat pihak sekolah selalu menyiapkan draft atau materi yang akan di bahas dan dismapaikan kepada anggota komite.
r. Daftar hadir rapat selalu di isi.
s. Semua kegiatan komite dengan sekolah selalu terdokumentasikan dengan baik
t. Komite belum memiliki kantor sendiri.
u. Komite belum memilki kelengkapan kerja organisasi yang tersendiri (almari, filling cabinet, computer)
v. Belum ada struktur organisasi yang berisi nama-nama komite beserta posisi dalam komite.
w. Secara internal hubungan komunikasi antar anggota komite sekolah sendiri tidak berjalan, hal ini terindikasikan dari belum pernah komite sekolah mengadakan rapat atau koordinasi atas inisiatif sendiri.
x. Komunikasi formal juga terhambat karena tidak ada kantor khusus untuk komite yang disediakan oleh sekolah.
y. Koordinasi atau rapat dengan pihak sekolah hanya dilakukan ketika komite mendaptakan undangan dari pihak sekolah.
z. Internal komite tidak ada pertemuan rutin.

2. **Karakteristik komunikasi informal antara komite sekolah dengan sekolah dalam rangka melaksanakan fungsi komite sekolah sebagai penampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat di SMPN 5 Klaten:**
   a. Ada tutuntan/aspirasi dari masyarakat.
   b. Ada hubungan mutualis mutualisme antara sekolah dengan lingkungan sekitar.
   c. Tingkat kerjasama sekolah dengan lingkungan sekitar sudah baik.
   d. Ada aturan tidak tertulis dalam hubungan informal.
   e. Tidak ada kegiatan bersama antara komite dan sekolah untuk membangun semangat kekeluargaan, keakraban dan persaudaraan belum berjalan.
   f. Tidak ada kegiatan monitoring kegiatan pembelajaran oleh komite baik bersama-sama maupun secara individu.
   g. Ada cara pemecahan masalah bersama melalui komunikasi informal.
   h. Adanya tuntutan kepada sekolah dari lingkungan diluar sekolah biasanya di sampaikan melalui komite sekolah kepada sekolah melalui komunikasi/pembicaraan-pembicaraan tidak resmi.
   i. Komunikasi informal diantara anggota komite masih sangat kurang.
   j. Komunikasi dengan media telepon antara pihak sekolah dengan anggota komite yang lain masih sangat kurang.
   k. Komunikasi informal melalui telepon antara komite dengan pihak sekolah masih kurang.
   l. Komite belum berani terbuka dengan pihak sekolah.
   m. Tidak ada media komunikasi sekolah (bulletin/leaflet)
   n. Ada papan informasi siswa
   o. Kegiatan komite dan sekolah terdokumentasi dengan baik.
   p. Kegiatan untuk mendukung terjalinya komunikasi informal diantara siswa berjalan dengan baik melalui kegiatan ekstra kurikuler.

3. **Karakteristik nilai-nilai etika komunikasi komite sekolah dalam rangka melaksanakan peran komite sebagai pendukung *(supporting agency)* baik yang berwujud pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan?**
   a. Masih dipeganya filisofi jawa.
   b. Menjunjung tinggi azas musyawarah.
   c. Perangkat kode etik/peraturan antara komite dengan sekolah tidak ada.
   d. Perangkat kode etik/peraturan siswa sudah ada.
   e. Nilai-nilai etika komunikasi antara komite dengan sekolah berjalan dengan baik dengan mengembangkan dan mengedepankan kejujuran, hal ini terindikasi dari pembuatan rencana pengembangan sekolah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan pada program kerja yang telah disepakati bersama.
   f. Pembuatan rencana anggaran biaya juga dibuat dengan kondisi yang cukup realistis karena rencana anggaran sudah dikoordinasikan dengan konsultan.
   g. Dalam berkomunikasi antara komite dengan sekolah juga dilandasi dengan sikap terbuka, terutama dalam rangka membuat rencana pengembangan sekolah, disampaikan oleh komite sekolah kepada wali murid dalam rapat pleno antara wali murid, komite sekolah dan pihak sekolah.
   h. Dalam rapat pleno wali murid dikembangkan beberapa pilihan alternative rencana beserta anggaranya, keputusan akan diambil berdasarkan atas pilihan dan kesepakatan dalam pleno wali murid.
   i. Rapat pleno dengan wali murid berjalan kondusif.

PEMBAHASAN

Hubungan kerja antara komite sekolah dengan sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya sangatlah penting. Dalam melaksanakan tugas ini, tidak ada istilah kepala komite tetapi ketua komite, hal ini menunjukkan

bahwa kepemimpinan komite sekolah bersifat kolektif. Hubungan kerja antara komite dengan sekolah di SMPN 5 Klaten adalah sebuah hubungan komunikasi yang dibangun bersama dalam rangka menjalankan peran komite sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan fungsi komite sekolah sebagai penampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan serta melaksanakan peran komite sebagai pendukung *(supporting agency)* baik yang berwujud pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari hasil penelitian ini, dengan nara sumber dari kepala sekolah, ketua komite sekolah dan anggota komite sekolah, selanjutnya peneliti akan membandingkan dengan penelitian sebelumnya dan akan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. **Karakteristik Komunikasi Formal Komite Dalam Rangka Melaksanakan Peran Komite Sebagai Pemberi Pertimbangan *(Advisory Agency)* Dalam Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan:.**

   Komunikasi formal di SMPN 5 Klaten dilaksankan dalam bentuk pertemuan-pertemuan atau rapat, baik rapat pleno, rapat koordinasi dan rapat konsultasi, hal ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Lestari (2011:1) yang memberikan pengertian bahwa komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif dan dikoordinasikan dengan baik, berdasarkan struktur organisasi oleh pelaku yang berkomunikasi sebagai petugas organisasi dengan status masing - masing yang tujuannya menyampaikan pesan yang terkait dengan kepentingan dinas . Suatu komunikasi juga dapat dikatakan formal ketika komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi dilakukan berdasarkan prinsip - prinsip dan struktur formal dalam organisasi.

   Demikian juga halnya Epina (2009: 3) memberikan tentang batasan pengertian komunikasi formal, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi diantara anggota organisasi yang tata caranya telah diatur dalam struktur

organisasinya, misalnya koordinasi kerja, rapat kerja, konferensi, seminar dan sebagainya

Dalam hal ini peneliti akan membandingkan tentang hubngan kerja terutama tentang komunikasi baik formal maupun informal dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan hasil penelitian di SMPN 5 Klaten.

a. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Alf Lizio dan Keitia Wilson (2009),* dalam penelitianya yang berjudul: *Student participation in university governance: the role conceptions and sense of efficacy of student representatives ondepartmental committees* (Partisipasi Mahasiswa Dalam Universitas: Konsep, Peran Dan Keberhasilan Mahasiswa pada Departemen Komite) bahwa komunikasi formal antara universita dengan komite menurut penelitian ini diaplikasikan dalam bentuk pengembangan keterampilan siswa misalnya (bidang kepemimpinan, kerja sama tim dan berpikir kritis) Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari pola pengembangan kegiatan ekstra-kurikulum yang mendorong kegiatan akademik dan pengembangan pribadi.

Out put dari kegiatan ekstra kurikulum yang sudah disepakati universitas dengan komite bahwa siswa akan lebih memiliki keterampilan dan menambah rasa percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan kerjasama yang dijalin oleh perwakilan komite berpotensi nyata dalam meningkatkan motivasi belajar dalam sejumlah kegiatan pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa peran komite adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan kontribusi dalam pembelajaran.

Temuan penelitian karakteristik komunikasi formal komite sekolah di SMPN 5 Klaten, bahwa komunikasi formal antara komite dengan pihak sekolah baru sebatas komunikasi dalam rangka koordinasi dalam menetapkan rencana program sekolah, karena semua rencana program sekolah sudah dibuat oleh pihak sekolah dan ditawarkan dalam sebuah forum pleno komite. Dalam konteks sub focus yang ditetapkan

oleh peneliti bahwa komite sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* maka proses hubungan kerja di SMPN 5 Klaten sudah berjalan dengan baik. Rencana program sekolah yang dibuat sekolah akan dibahas dalam pleno dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari komite sekolah. Secara prinsip bahwa tanggung jawab tanggung jawab komite sekolah adalah bersifat kolektif kolegia, yaitu bahwa segala sesuatu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab ketua komite sekolah. Sistem komunikasi formal antara komite sekolah dengan sekolah, selalu menggunakan azas musyawarah, kekeluargaan dan kegotong royongan apabila terjadi perbedaan atau hambatan yang dihadapi pihak sekolah dengan komite sekolah.

Komunikasi formal di SMPN 5 Klaten ini hanya berjalan sebatas dalam tahap perencanaan, sedangkan aplikasi pelaksanaan dari keputusan yang telah disepakati bersama belum berjalan dengan baik, misalnya dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah yang berbentuk pengembangan fisik sekolah hanya dilaksanakan sepihak oleh sekolah tanpa ada komunikasi lanjutan, inilah yang kadang membuat adanya mis komunikasi. Komunikasi formal dibangun hanya pada saat menyusun perencanaan program dan pada saat pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sekolah. Padahal idealnya bahwa komunikasi formal harus dibangun secara berkelanjutan dan kontinyu, artinya perlu dibangun komunikasi yang intens mulai dari tahan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, tahap laporan dan evaluasi kegiatan. Terjadinya celah dalam komunikasi formal ini menyebabkan fungsi komite sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga muncul kesan bahwa komite sekolah hanya berfungsi sebagai lembaga yang melegitimasi rencana program dengan melaksanakan fungsi pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dan melegitimasi laporan atas kegiatan sekolah, akan tetapi kurang dalam legitimasi pelaksanaan program sekolah.

Keterkaitan dengan penelitian *Alf Lizio dan Keitia Wilson* bahwa komite tidak hanya memberikan pertimbangan kepada sekolah akan tetapi komite sudah mampu memberikan usulan dan gagasan konsep kepada sekolah dan akhirnya diaplikasikan dalam kegiatan nyata dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler. Sedangkan komite di SMPN 5 Klaten komite belum mampu membuat, merumuskan dan menyampaikan gagasan dan inisiatif orisinil yang berasal dari hasil koordinasi internal komite dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan konsep maupun terobosan demi kemajuan sekolah, akan tetapi baru pada tahap memberikan pertimbangan.

2. Komunikasi Informal Komite Sekolah Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Komite Sebagai Penampung Aspirasi, Ide, Tuntutan Pendidikan.

Menurut Lestari (2011:1) komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi , akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi . Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok informal. Informasi dalam komunikasi informal biasanya timbul melalui rantai kerumunan dimana seseorang menerima informasi dan diteruskan kepada seseorang atau lebih dan seterusnya sehingga informasi tersebut tersebar ke berbagai kalangan . Implikasinya adalah kebenaran informasi tersebut menjadi tidak jelas atau kabur . Meski demikian komunikasi informal akan untuk memenuhi kebutuhan sosial, mempengaruhi orang lain , dan mengatasi kelambatan komunikasi formal yang biasanya cenderung kaku dan harus melalui berbagai jalur terlebih dahulu.

Menurut Sulistyani (2002: 1) komunikasi informal bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Hal ini dikarenakan dengan adanya berbagai aktivitas komunikasi yang dilakukan secara dialogis diharapkan kedua belah pihak merasa bebas menyampaikan

pesan maupun informasi, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan penuh dengan keakraban.

Dalam hal ini peneliti akan membandingkan antara penelitian yang pernah dilakukan dengan kondosi yang ada di SMPN 5 Klaten, dan hasilnya sebagai berikut:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Alf Lizio dan Keitia Wilson (2009),* dalam penelitianya yang berjudul: *Student participation in university governance: the role conceptions and sense of efficacy of student representatives ondepartmental committees* (Partisipasi Mahasiswa Dalam Universitas: Konsep, Peran Dan Keberhasilan Mahasiswa pada Departemen Komite) bahwa komunikasi informal antara universitas dengan komite menurut penelitian ini lebih merupakan akibat dari timbulnya hubungan komunikasi formal. Komunikasi formal yang diaplikasikan dalam bentuk pengembangan keterampilan siswa misalnya (bidang kepemimpinan, kerja sama tim dan berpikir kritis) merupakan bentuk kegiatan yangdi kembangkan dalam kegiatan ekstra-kurikulum merupakan wahana bagi terbinanya komunikasi informal siswa dengan baik. Out put dari kegiatan ekstra kurikulum yang sudah disepakati universitas dengan komite bahwa siswa akan lebih akrab dengan sesame siswa dan menambah rasa percaya diri.

Temuan penelitian karakteristik komunikasi informal komite sekolah di SMPN 5 Klaten secara internal antara sekolah dengan komite sudah cukup baik, misalnya dalam keterlibatanya memecahkan masalah sekolah dengan lingkungan, aplikasi hubungan antara komite dengan sekolah untuk menciptakan hubungan komunikasi informal antar siswa juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler yang sama-sama memiliki tujuan untuk pengembangan pribadi siswa baik untuk menambah rasa percaya diri siswa, menambah keakraban siswa maupun menambah ketrampilan siswa.

Keterkaitan dengan penelitian *Alf Lizio dan Keitia Wilson* bahwa komite telah sama-sama melaksanakan fungsinya dalam rangka membangun komunikasi informal antar siswa, akan tetapi di SMPN 5 Klaten komunikasi informal antara komite dengan sekolah baru berjalan dalam tahapan

pemecahan masalah sekolah dengan lingkungan, sedangkan komunikasi informal antara sekolah dengan komite yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama belum berjalan.

3. Nilai-Nilai Etika Komunikasi Komite Sekolah Dalam Rangka Melaksanakan Peran Komite Sebagai Pendukung *(Supporting Agency)* baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga:

Hamad (2010: 170) menggambarkan tentang nilai komunikasi dengan beberapa kreteria: 1) Dalam komunikasi dilandasi dengan kejujuran; 2) Apa yang disampaikan atau dikomunikasikan adalah sesuatu yang benar. Sedangkan nilai menurut Andrew Brown (1998) dalam Wirawan (2007: 45) mengatakan bahwa individu atau organisasi yang memiliki nilai apabila individu atau organisasi tersebut dalam bertindak memiliki sikap jujur, integritas dan terbuka. Dari hal tersebut di atas peneliti dapat simpulkan bahwa karakteristik nilai-nilai komunikasi adalah: 1) Apa yang disampaikan sesuai dengan aturan, ketentuan dan tatanan dalam organisasi; 2) Apa yang dikomunikasikan mengandung nilai kejujuran; 3) Apa yang dikomunikasikan mengandung nilai kebenaran; 4) Memiliki integritas dan; 5) Memiliki sikap terbuka.

Dalam hal ini peneliti akan mencoba membandingkan antara penelitian yang pernah dilakukan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMPN 5 Klaten, hasilnya sebagai berikut bahwa menurut penelitian *Paula Denton,* 2003 dalam penelitianya yang berjudul: *Share Rule Making in Practice: The Jefferson Committee At Kingston High School,* menyatakan bahwa dalam sekolah tinggi Jefferson di Kingstone ini memiliki sebuah komite yang bernama Jefferson Komite. Antara Komite Jeferson dan pihak sekolah di Kingston telah terjalin sebuah hubungan kerja dalam bentuk kerjasama dalam membantu merumuskan, menciptakan dan memelihara suatu kode etik sekolah yang berapa seperangkat aturan sekolah yang diberlakukan bagi sekolah para siswa, pihak fakultas dan administrator. Komite

mengadakan pertemuan tahunan publik untuk meninjau kode etik yang telah dilaksanakan. Sedangkan dari keputusan yang dibuat oleh komite dalam penelitian yang dilakukan oleh denton *Kingstone High School* belum menghasilkan sebuah komunikasi informal yang mampu memberikan kontribusi riil kepada siswa terutama bagi pengembangan diri siswa.

Temuan yang bisa amati adalah di Kingston High school komite telah merumuskan kode etik bagi siswa, sedangkan di SMPN 5 Klaten kode etik bagi siswa posisi komite hanya sebatas terlibat dalam melegitimasi.

Keterkaitan dengan penelitian *Denton* ini bahwa komite di Kingston High School dan komite di SMPN 5 Klaten telah sama-sama menjaga nilai-nilai etika komunikasi bagi siswa, perbedaanya apabila di Kingston High Scholl kode etik di buat oleh komite, sedangkan kode etik di sekolah sepuhnya disusun oleh pihak sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Hubungan kerja komite sekolah di SMPN 5 Klaten melalui komunikasi formal dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu adanya peningkatan terutama pada masalah intensitas dan jadual rrutin pertemuan yang akan dilaksanakan. Komunikasi formal harus dilaksanakan secara sinergis, artinya komunikasi ini harus dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi program.
2. Hubungan kerja di SMPN 5 Klaten melalui komunikasi informal dalam rangka melaksanakan perannya sebagai penampung aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat masih perlu dtingkatkan, komunikasi baru berjalan pada tingkat pimpinan antara kepala sekolah dengan ketua komite, komunikasi ini lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan yang sifatnya mendesak dan butuh kebijakan dari sekolah.

3. Hubungan kerja komite di SMPN 5 Klaten melakui saluran komunikasi formal dan informal akan berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak antara komite dan sekolah saling menjunjung nilai-nilai etika dalam berkomunikasi. Nilai kejujuran, keterbukaan dan obyektifitas dalam menyampaikan informasi sudah berjalan dengan baik.

Saran:

1. Bagi Pihak Sekolah (Kepala Sekolah)
   a. Sebagai masukan agar ke depan dapat dijalin hubungan kerja komite dengan sekolah di SMPN 5 Klaten sebaik-baiknya dengan menerapkan konsep kemitraan dengan PACTS Principles, bukan pada pola kemitraan yang berat sebelah dan tidak seimbang, PACTS Principles akan mengasilkan sebuah hubungan yang sinergis.
   b. Sebagai masukan agar lebih memberikan ruang kepada komite dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam memajukan masyarakat sekolah melalui peranya sebagi pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dan sebagai pendorong *(supporting agency).*
   c. Dapat memotivasi untuk mewujudkan sistem komunikasia antara komite dengan sekolah, dengan komunikasi komunikasi formal yang lebih terencana, terarah dan terstruktur serta membangun komunikasi informal guna meningkatkan semangat kebersaman, keakraban dan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 2006. *Format Baru Pengelolaan Pendidikan* (Dalam Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003) Jakarta: Pustaka Indonesia.

Adriansyah, Ansori. M. 15 Januari 2010. *"Kemitraan Komite Dengan Kepala Sekolah"* Diakses Jam 22.30 Tanggal 24 November 2011

Bungin, Burhan.2008. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat.* Jakarta:

Cikoko, Vitalis. 2008. *"The Role Parent Governors In School Governance In Zimbabwe: Percepcions Of School Hads, Tachers And Parent Governors"* Nomor 54:243-263

Departemen Pendidikan Nasional , 2003. *Panduan umum dewan pendidikan dan Komite Sekolah,* Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan dasar Dan Menengah.

Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Hamad, Ibnu. 2010. *"Komunikasi Sebagai Wacana"*. Jakarta: La Tofi Enterprise.

Hakim, Abdul. 22 Juni 2011. *"Komite Sekolah Hanya Berani Kepada Orang Tua Siswa"*. Diakses Jam 09.00 Tanggal 29 Juni 2011

Haryadi, Yadi & Meirawan, Danny. 2006. *"Pemberdayan Komite Sekolah"*. Depdiknas. Diakses Jam 21.00 Tanggal 5 Oktober 2011.

Hidayat, Atif. 2009. *"Pengertian Nilai"* Diakses Jam 09.00 Tanggal 1Desember 2011.

Lestari, Endang & Maliki, MA. 20011. *"Pengertian Komunikasi Formal, Informal dan Non Formal"* Diakses Jam 13.00 Tanggal 30 November 2011.

Mangkuprawira. Sjafri, Hubeis. Aida Vitayala. 2007. *"Manajemen Mutu Sumber Daya manusia"*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mujtahid. 15 Mei 2010. *"Pemberdayaan Komiet Sekolah"* Diakses Jam 22.30 Tanggal 24 November 2011.

Mulyono, 2009. *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan,* Yogyakarta: Ar Ruez Media.

Moleong, Lexy. 2010. *Methodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Montori, Soleman. 15 Juni 2011. *"Apa Dan bagaimana Peran Dan Fungsi Komite Sekolah?* Diakses jam 22.30 tanggal 24 November 2011

Nurkholis, 2006. *"Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model Dan Aplikasi)"*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pantjastuti, Sri Renani & Haryanto, Agus. & Suparlan. & Yudistira, 2008. *Komite Sekolah (Sejarah dan prospeknya di masa depan)*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Prakoso, Adi. 2007. *"Teori Komunikasi Organisasi"* Diakses Jam 22.30 Tanggal 24 November 2011

Robbins, Stephen P. 2001. *"Perilaku Organisasi"* Prentice Hall, Inc. Terjemahan Oleh Tim Indeks. Tahun 2003. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Rosyada, Dede. 2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan) Jakarta: Kencana Predana.

Saptyasari, Andria & Moerdijati, Sri. 2009. *"Nilai-Nilai Budaya Dalam Komunikasi Antarpesona"*. Diakses jam 09.00. Tanggal 01 Desember 2011

Solo Pos, 14 Juni 2011. *"80% Komite Sekolah di Klaten Tidak Berfungsi"* Diakses Jam 09.00 Tanggal 29 November 2011

Syaharudin & Agustina, Ella. 2011. *"Mengingat Lagi Peran dan Fungsi Komite Sekolah"*. Diakses jam 22.30 Tanggal 24 November 2011.

Sagala, Syaiful, 2009. *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakrta: Kemala Prenada Media Group.

Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi.* Wadsworth Publishing Company. Terjemahan. Oleh Misbah Zulfa Elizabeth. Tahun 2007. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Sujanto, Bedjo. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (Model pengelolaan sekolah di era otonomi daerah).* Jakarta: CV Sagung Seto

Sulistyani, Erna. 2002. *"Hubungan Komunikasi Informal Pimpinan Dengan Kedisiplinan Karyawan"* Diakses Jam 22.30 Tanggal 22 November 2011

Sumpeno, Wahyudin. 2009. *Sekolah Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suparlan, 2010. *"Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010"* Diakses Jam 22.30 Tanggal 24 November 2011

Susilo, Budi. 25 Juli 2010. *"Keterlibatan Masyarakat Secara Penuh Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan"* Diakses Jam 22.15 tanggal 24 November 2011.

Sulistyani, Erna. 22 Juli 2002. *"Hubungan Komunikasi Informal Pimpinan Dengan Kedisiplinan Kerja Karyawan"* Diakses Jam 22.30 Tanggal 24 November 2011

Thoha, Miftah. 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta

Tubbs, Steward L & Moss, Sylvia, 2005. *"Human Communication"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

_____, 2006. *Penguatan Kelembagan Komite.* Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral manajemen Pendidikan dasar Dan Menengah, Jakarta

_____, 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Thun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* Jakarta: Wipress

Wirawan, 2007. *"Budaya dan Iklim Organisasi"*. Jakarta: Penerbit: Salemba Empat.

Wirawan, Cahyo. 2011. *"Transformasi Fungsi Komite Sekolah Dalam Pengawasan dan Pembangunan Sarana Sekolah"* Diakses Jam 22.30 Tanggal 24 November 2011

WJS Purwodarminto. 1966. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Yusuf, M. 21 Januari 2009. *"Pemberdayaan Komite Sekolah"* Diakses jam 22.15 tanggal 24 November 2011

NASKAH PUBLIKASI

Tesis
HUBUNGAN KERJA KOMITE SEKOLAH DENGAN SEKOLAH
Studi Situs Di SMPN 5 Klaten

Oleh:
AGUNG WIDODO
NIM: Q100080451

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis

Hubungan Kerja Komite Sekolah Dengan Pihak Sekolah, Studi Situs Di SMPN 5 Klaten

Surakarta, Februari 2012

Pembimbing

Prof. Dr. Harsono, MS

ABSTRACK

Agung widodo, NIM: Q100080451, Relationship Between Employment School With The School Committee, A Study In SMPN 5 Klaten.

This study aims belongs to: (1) investigate the characteristics of formal communication between the school committee with the school in order to miximize functions as a conduit of consideration of the school committee (advisory agency) in the determination and implementation of education policy, (2) investigate the characteristics of informal communication between the school committee with schools in order to maximize the role of the committee as a support (supporting agency) in the form of thinkers and workers in the education in the education unit, and (3) knowing the characteristic values of communication made by the school committee with the school in order to carry out the function is to accommodate the school committee in and analyze the aspirations, ideas, demands and other needs of the proposed public education in SMPN 5 Klaten.

The main subject in this research is the committees leader and the headmasters of SMPN 5 Klaten, whereas the other subject is the members of school committee.

This research used a qualitative method, it is a method that used to look for a deep information regarding a phenomena as a target research. Whereas the technique of analysis, it is describe a culture.

Based on research in SMPN 5 Klaten, that relationship the school committee working with schools in the context of communication (formal and informal) in order to carry out the functions and position not gone well, the communication that goes only to the extent there are levels of program planning and reporting stages, while the stage of program implementation school committee is not involved.

From the analysis, the researchers suggest (1) a working relationship with school committees in performing their duties, should establish formal communication patterns are more intensive, targeted and programmed, rather than communication patterns are not clear direction and purpose. Clarity of formal communication links will be able to put the concept of true partnership to produce an equal relationship, mutual trust, exchange and mutual partisipation, (2) labor relations in the school committee should start SMPN 5 Klaten built continue and clear communication, from the planning, execution, reporting and communication program evaluation stage, rather than on the communication patterns that could lead to miss communication, suspicion and loss of confidence, (3) working relationship with school committees in SMPN 5 Klaten should be immediately established the concept of partnership with the PACTS Principles, rather than on partnership pattern of biased and not balanced, PACTS Principles will result in a synergistic relationships, (4) for subsequent studies, researchers need to conduct further studies on factors that affect the working relationship between the school committee in the other schools, it This research is due to only one school, so things are related to labor relations committee of the school information is very minimal.